

KAPITALISME DAN KETIMPANGAN SOSIAL DI ERA GLOBALISASI (STUDI KASUS PT FREEPORT INDONESIA DI PAPUA)

CAPITALISM AND SOCIAL INEQUALITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION (A CASE STUDY OF INDONESIAN FREEPORT IN PAPUA)

¹Evarista Ndawa, ²Angga Rosidin

Universitas Pamulang
dosen03003@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait teori kapitalisme dan ketimpangan sosial yang terjadi di Papua yang menjadi dampak dari pembangunan PT Freeport Indonesia yang berpengaruh cukup besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat setempat menggunakan teori kapitalisme dan ketimpangan sosial Karl Marx. Penelitian bertujuan untuk mengetahui terkait sistem ekonomi kapitalis di PT Freeport Indonesia yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi dan ketimpangan terhadap masyarakat adat setempat, lalu menjelaskan terkait pengaruh sistem ekonomikapitalisme terhadap kehidupan sosial masyarakat Papua, serta pemberian solusi yang tepat terkait penerapan sistem ekonomi yang tepat untuk PT Freeport demi kepentingan bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka, dimana menggunakan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat adat Papua dengan adanya perusahaan Freeport Indonesia ini, seperti: adanya kerusakan lingkungan, timbulnya konflik antar kelompok, timbulnya kesenjangan sosial, ketimpangan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Papua dan merekomendasikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat. Penelitian ini juga merekomendasikan bagaimana seharusnya mengembangkan tambang di Papua tanpa merusak lingkungan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat setempat dan mengatasi eksploitasi sumber daya oleh PT Freeport demi kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Kapitalisme, Ketimpangan Sosial, Globalisasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the theory of capitalism and social inequality in Papua, which is the result of the development of PT Freeport Indonesia, which has had a significant impact on the social and economic life of the local indigenous community, using Karl Marx's theory of capitalism and social inequality. The research aims to understand the capitalist economic system at PT Freeport Indonesia that has caused economic disparities and inequalities among the local indigenous communities, explain the impact of the capitalist economic system on the social life of

the Papuan people, and propose appropriate solutions regarding the implementation of an appropriate economic system for PT Freeport for the common good. This research uses a qualitative approach with a literature study method, utilizing sources relevant to the topic discussed in this study. The results of the research indicate that the presence of Freeport Indonesia has had a significant impact on the indigenous Papuan community, such as environmental damage, conflicts between groups, and social inequality. This research was conducted to provide an understanding of the social and economic conditions of the Papuan community and to recommend actions that need to be taken by both the local and central governments. This research also recommends how mining in Papua should be developed without damaging the environment and disrupting the welfare of the local community, as well as addressing the exploitation of resources by PT Freeport for the welfare of the local community.

Kata Kunci: Capitalism, Social Inequality, Globalization.

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi kapitalis merupakan salah satu sistem ekonomi yang dianggap anarkhi yang dikemukakan oleh Adam Smith dan rekan-rekannya, dimana mereka menjelaskan bahwa sistem kapitalis itu berarti pemilik modal memiliki hak penuh atas proses ekonomi yang dijalankannya. Dengan menerapkan sistem kapitalisme ini, para ekonom atau pemilik modal memiliki hak penuh atas kegiatan ekonomi, pemerintah tidak harus ambil bagian dalam mengatur kegiatan ekonomi dan memberikan kebebasan penuh kepada pemilik modal untuk menentukan segala sesuatunya tanpa campur tangan pemerintah itu sendiri. Hal ini didasarkan pada pendapat para ekonom bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi dalam hal apapun sudah memiliki asas atau aturannya sendiri dalam hukum ekonomi dan pemerintah tidak harus sepenuhnya mengambil bagian didalamnya. Milton H. Spencer (1990) dalam Agustiaty mengatakan bahwa “Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif”.

Pada hakikatnya sistem ekonomi kapitalis ini berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat sekitar ataupun pekerja yang bekerja disitu. Kenapa demikian? Karena dengan menerapkan sistem ekonomi kapitalis ini sangat berdampak pada timbulnya kesenjangan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan dan banyak hal lain yang terjadi dan merugikan masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan Karl Marx yang mengkritik teori kapitalis dari Adam Smith yang mengatakan bahwa dalam teori kapitalisme kaum pemilik modal melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh sehingga adanya pembagian

kelas diantara keduanya. Dan hal ini ditolak oleh Karl Marx karena ia merasa tidak perlu adanya kelas diantara kaum buruh dan kaum pemilik modal karena suatu saat semua itu bisa saja berbalik dimana yang menjadi pemilik modal akan menjadi buruh dan begitu sebaliknya.

Salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ini pada dasarnya dikarenakan perbedaan sumber daya yang dihasilkan setiap daerah. Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi perlulah adanya pembangunan ekonomi yang merata disetiap daerah, seperti pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan, serta modal-modal sosial untuk pembangunan berkelanjutan daerah tersebut. PT Freeport merupakan sebuah perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang dimana perusahaan ini beroperasi dalam bidang pertambangan. Disisi lain, Papua merupakan salah satu daerah dengan penghasil tambang terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, PT Freeport ini mulai masuk dan beroperasi di perambangan Indonesia. PT Freeport ini mulai masuk dan beroperasi dalam pertambangan di Indonesia sejak April, 1967 dan dinamakan PT Freeport Indonesia atau biasa disingkat PTFI. PT Freeport Indonesia mulai berkolaborasi atau bekerjasama secara langsung di bawah naungan PT Freeport Amerika Serikat yaitu Freeport-McMoran & Gold Company (FCX). PT Freeport Indonesia sendiri merupakan salah satu anak perusahaan dari Freeport-McMoran & Gold Company.

Hadirnya PT Freeport Indonesia di Papua ini tidak serta merta membawa dampak positif bagi Indonesia karena memberikan keuntungan berupa persen dari hasil tambang tersebut, tetapi sangat signifikan juga pengaruh negatifnya terutama bagi masyarakat setempat. Adapun dampak langsung dari operasi PT Freeport ini bagi masyarakat adat adalah, antara lain, adanya eksploitasi sumber daya, kerusakan lingkungan akibat limbah pabrik, ketimpangan ekonomi masyarakat adat, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memberi pemahaman terkait apa yang terjadi dan yang melanda pedalaman Papua saat ini, yang masih merasakan ketimpangan ekonomi akibat pengelolaan tambang yang tidak menguntungkan masyarakat adat tetapi malah merugikan.

Untuk membahas lebih lanjut terkait topik yang dibahas, terdapat tiga masalah pokok yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu 1). bagaimana penerapan sistem ekonomi kapitalisme di PT Freeport Indonesia? 2). Bagaimana sistem ekonomi kapitalisme berpengaruh pada

kehidupan sosial masyarakat adat papua? 3). bagaimana penerapan sistem ekonomi yang tepat agar tidak menimbulkan konflik bagi masyarakat adat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang relevan dan memungkinkan peneliti mengkaji terkait topik penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang tepat. Penelitian kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan minat peneliti yaitu menganalisis dan memperdalam pemahamannya terkait kapitalisme dan ketimpangan sosial di Indonesia. Dengan kemampuan analisis peneliti diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan dapat sampai ke khalayak umum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau literatur yang relevan, seperti artikel akademis, buku, peraturan yang relevan, serta laporan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi terkait penerapan ekonomi kapitalisme di PT Freeport Indonesia di Papua, ketimpangan ekonomi yang terjadi di pedalaman Papuan akibat pengoprasian PT Freeport, serta kesenjangan sosial masyarakat adat yang diakibatkan oleh kinerja PT Freeport Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis tematik, yang mana kata-kata kunci diidentifikasi dan dibuat sesederhana mungkin untuk menemukan konsep yang relevan dengan tujuan penelitian ini dilakukan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi penyebab utama adanya ketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat pedalaman Papua.

C. Hasil dan Pembahasan

Seiring dengan perkembangan jaman, pemikiran masyarakat tentu harus semakin kritis terhadap isu-isu sosial dan ekonomi yang terjadi. Dalam repository UPN Veteran Jakarta mengatakan bahwa “Modal merupakan tuntutan baru zaman globalisasi. Dalam pembangunan sebuah negara, sulit rasanya mengembangkan negara tanpa adanya modal. Apalagi mereka yang berada di paling bawah dari hirarki ekonomi global dan dinyatakan sebagai negara dunia ketiga atau dikenal sebagai negara berkembang”. Artinya untuk bisa melakukan atau mengelola sumber daya yang ada, hal perlu diperhatikan adalah modal. Oleh karena ketidakmampuan Indonesia mengelola tambangnya sendiri, maka PTFI berani menanamkan modalnya di pertambangan

Indonesia dengan mengambil keuntungan sebesar mungkin dan melakukan eksploitasi sesuka hati tanpa memperdulikan masyarakat adat yang ada di daerah tersebut. Perusahaan tambang ini menggunakan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya menguntungkan mereka secara individu. Meskipun akhirnya Indonesia memiliki 51% saham dalam pertambangan ini, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat adat setempat tidak sejahtera. Dimana masyarakat hanya dipekerjakan sebagai buruh biasa dengan gaji sesuai aturan perusahaan. Namun, seiring berkembangnya waktu, kebutuhan akan tenaga kerja manusia mulai berkurang, menyebabkan tingginya angka pengangguran masyarakat Papua yang mana mereka bukanlah orang berpendidikan dan tidak memiliki keahlian lebih selain dalam bidang pertambangan.

1. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme di PT Freeport Indonesia

Kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang mana lebih menguntungkan satu pihak yang disebut kaum borjuis atau kaum pemilik modal. Hal ini terjadi karena sistem ekonomi kapitalis ini mementingkan keuntungan secara individu bagi para pemilik modal tanpa melihat keuntungan bagi kaum buruh atau pekerja serta mengakibatkan adanya pembagian kelas diantara keduanya. Hasan dan Mahyudi, 2020 mengatakan “Kapitalisme merupakan sebuah teknik pertukaran kekayaan yang terhimpun diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk mendapatkan keuntungan, distribusi dan produksi. Kapitalisme adalah sebuah cara atau metode yang dirancang dalam rangka untuk mendorong pengembangan profitabel melewati sekat-sekat mengarah pada skala nasional dan Internasional”. Dalam skala global tidak sedikit penolakan terhadap sistem ekonomi kapitalisme ini, karena dianggap menyebabkan adanya eksploitasi baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia demi keuntungan kepemilikan akibat sistem ekonomi kapitalisme ini.

Adapun definisi kapitalisme menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

“Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Menurutny, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa, yang seolah-olah, individu didorong dengan “Tangan Tak Terlihat” (The Invisible Hand) yang mendorong mereka untuk maju. Adapun Max Weber, mendefinisikan kapitalisme adalah sebuah cara produksi komoditi yang berlandaskan kerja berhonorarium untuk dipasarkan dan sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperjual-belikan dalam rangka mendapatkan laba. Bagi Weber, tanda-tanda

konsep kapitalisme yang mendasar ada pada cara-cara pertukaran di area pasar. Metode dipasar ini dapat menyebabkan kelogisan yang mengarah pada langkah-langkah untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai corak atau introduksi golongan kapitalis. Adapun corak yang kaum kapitalis sadari adalah dimotivasi oleh pemikiran pola ekonomi dalam rangka menumpuk kekayaan. Konsep kapitalisme bagi Marx merupakan suatu formasi masyarakat kelas dan didistribusikan dengan aturan eksklusif, yang mana manusia dikonstruksi untuk produksi dalam kebutuhan hidupnya.”

Sistem ekonomi kapitalisme ini tidak serta merta hanya berdampak baik dan menguntungkan para pemilik saham, karena sistem ekonomi kapitalisme ini sangat berdampak pada kesenjangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan banyak lagi dampak negative lainnya yang dipengaruhi oleh penerapan ekonomi kapitalisme ini. Salah satu dampak langsung dari penerapan ekonomi kapitalisme ini adalah timbulnya ketimpangan sosial-ekonomi yang juga mengakibatkan kesenjangan antar masyarakat adat.

PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia dan mulai beroperasi dibidang pertambangan Indonesia tepatnya di Papua sejak tahun 1960 setelah menandatangani Kontrak Karya Legal dengan Indonesia dengan perjanjian adanya pembagian saham atau keuntungan. Pada awalnya memang Indonesia mendapatkan hanya beberapa persen saja dari hasil tambang tersebut dan mayoritas sahamnya adalah milik Amerika Serikat, namun pada saat perpanjangan kontrak di tahun 2018, Indonesia mendapat 51% dari saham tersebut. Meski demikian, pengelolaan tambang oleh PT Freeport ini tidak menguntungkan dan bahkan merugikan masyarakat adat setempat. Masyarakat setempat hanya menjadi buruh biasa yang mendapat upah dari pemilik saham yaitu PT Freeport itu sendiri. Hal inilah yang kerap menjadi permasalahan sampai hari ini dan belum mendapat respon baik dari pihak manapun.

Sistem ekonomi kapitalis di PT Freeport Indonesia sangat signifikan. Perusahaan tambang ini mengeksploitasi sumber daya yang ada di Papua untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Meskipun keuntungan yang didapat dari pertambangan yang dihasilkan oleh PTFI ini mayoritas pemilik sahamnya adalah Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini tidak menguntungkan bagi masyarakat adat dan bahkan sangat merugikan mereka. PT Freeport Indonesia ini diberi julukan sebagai sosok maskulin Tabu di tanah Papua.

Kedatangannya yang merenggut kekayaan akan tambang di tanah Papua sangat anarkhi. Mereka memikirkan keuntungan individu sebagai pemilik saham tanpa memperhatikan lingkungan dan bahkan keadaan masyarakat adat setempat yang sangat menjunjung tinggi keindahan alam yang ada tanpa merusaknya sedikitpun.

Sampai hari ini penyebab utama perseteruan antara masyarakat adat dan pemilik saham PTFI adalah karena adanya eksploitasi sumber daya alam dan manusia, kerusakan lingkungan yang sangat memprihatinkan, kesenjangan sosial antar masyarakat adat, serta adanya ketimpangan sosial-ekonomi pada masyarakat adat. Pembangunan dan pengelolaan tambang yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena adanya penyediaan lapangan kerja dengan adanya FDI, namun yang terjadi di lapangan jauh berbeda, karena nyatanya dari hasil sensus BPS tahun 2010, yang berada di tingkat kemiskinan yaitu dapat dilihat bahwa Papua sebagai wilayah konsesi PTFI berada di urutan kedua sebagai wilayah termiskin dengan persentase 34,88%. Yang artinya keberadaan PTFI atau pengelolaan tambang tidak sedikitpun memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat setempat.

Pada dasarnya kehadiran PTFI ini memperkecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial antar masyarakat karena dianggap akan secara terstruktur dan sistematis mengatur dan mengelola tambang dengan baik, namun pada kenyataannya Freeport ini malah menciptakan kesenjangan antar sektor pemilik modal atau penambang dengan masyarakat lokal yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Tahun 2010 PTFI memberikan kontribusi 90% pada pembangunan Mimika. Sedangkan sisanya yaitu 10% disumbang dari pertanian tradisional. Dengan kata lain ada indikasi ketergantungan kabupaten terhadap kontribusi Freeport.

2. Ketimpangan sosial-ekonomi akibat pengoprasian tambang oleh PT Freeport Indonesia di Papua

Jika berbicara tentang ketimpangan, semua orang mungkin menyadari apa yang melanda masyarakat adat Papua hari ini. Ketimpangan, kesenjangan, kerusakan lingkungan, dan banyak kerugian lain yang mereka dapatkan yang merupakan impact dari hadirnya PTFI di pertambangan Indonesia. Hari ini, masyarakat adat yang diyakini sebagai pemilik tanah karena merekalah yang pertama kali menduduki tempat disingkirkan dari sana demi kepentingan individu mereka sebagai penanam modal atas saham dalam pertambangan. Masyarakat adat diasingkan dan bahkan dieksploitasi oleh PTFI ini. Nita Safitri mengatakan bahwa, “Kasus di

Indonesia suku Amungme dan suku Komoro terjajah akibat kehadiran PT Freeport Indonesia yang disingkirkan akibat tanah hutan merupakan sumber penghidupan mereka untuk proyek pertambangan diambil dengan paksa.” Lalu Safitri melanjutkan bahwa, “Kasus masyarakat adat di Papua khususnya suku Amungme dan Komoro yang berkonflik dengan PT FI sudah berlangsung sejak lama kurang lebih 40 tahun sejak tahun 1969, yang memakan korban nyawa, harta benda, tanah lahan baik dipihak masyarakat adat maupun pihak karyawan PT FI, pegawai pemerintah, ABRI maupun pihak kepolisian. Dapat dikatakan konflik sudah bersifat akut dan merupakan masalah sosial berdampak multidimensional.” Artinya konflik ini memang tidak akan pernah selesai sampai masyarakat adat merasa hak mereka terpenuhi dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut terjamin.

Adapun beberapa hasil penelitian dari peneliti terdahulu dimana proyek pertambangan ini mengakibatkan berbagai masalah dalam masyarakat, yaitu: a). adanya kerusakan lingkungan hidup masyarakat yang mana sangat berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat, pekerjaan, serta hubungan sosialnya; b). meningkatnya ketegangan sosial yang terjadi akibat adanya perubahan-perubahan yang terlalu cepat; c). timbulnya berbagai konflik antarkelompok, antar generasi, maupun antar masyarakat adat dengan pemerintah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam jangka Panjang yang tentunya sangat tidak aman dan nyaman bagi masyarakat setempat; d). adanya kesenjangan sosial antarmasyarakat, terutama bagi masyarakat pendatang yang akan diasingkan; e). munculnya ketidakpastian hidup yang mana masyarakat-masyarakat yang terkena gusur akibat tanahnya dipergunakan untuk kepentingan tambang harus merasakan ketidakpastian hidup atau hidup bergantung. Dengan demikian keuntungan yang didapat Indonesia dari PTFI tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami masyarakat adat Papua yang terkena impact dari pembangunan dan pengelolaan tambang di daerah pedalaman Papua ini.

Dalam destaria Verani Soe’oed, 2024, mencatat jumlah pekerja lokal dan nonlokal yang bekerja di PTFI disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, dimana tenaga terampil (ahli) dari pekerja lokal hanya 10% dibandingkan dengan pekerja nonlokal dengan persentase 90%, lalu tenaga kerja dengan upah rendah mendapat 75% pekerja lokal dan sisanya adalah pekerjaan nonlokal. Dari hal ini saja ketimpangan ekonomi yang dipengaruhi oleh PTFI ini sangat jelas.

Pekerja lokal mendominasi pekerjaan yang memperoleh upah rendah, sedangkan pekerja nonlokal mendapatkan posisi atau pekerjaan yang maksimal.

Selain itu, kerusakan lingkungan yang berdampak jangka Panjang menjadi masala besar yang kerap memprihatinkan. Ekosistem makhluk idup yang langka akan punah, pencemaran udara akibat limbah pabrik dimana-mana, pencemaran sungai dan kerusakan lainnya hingga menipisnya lapisan ozon akibat pemanasan global karena impact dari pengelolaan tambang tersebut.

3. Solusi yang disarankan untuk keberlanjutan pngelolaan tambang demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Papua

Tuntutan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat adat untuk memperoleh hak mereka atas kepemilikan tanah bukan berarti melarang PTFI beroperasi di pertambangan Indonesia melainkan pemberian hak yang memang harus didapat oleh masyarakat adat setempat demi kesejahteraan bersama. Hal ini tidak serta merta mereka mendapatkan uang tetapi mereka juga patut diberikan kehidupan yang layak agar kesannya mereka tidak diasingkan.

Hal yang paling penting mendasar juga yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran khalayak umum terkait konflik yang terjadi sehingga pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, peran media sangat dibutuhkan untuk menggali informasi sekaligus memberikan informasi kepada publik terkait masalah yang terjadi, sehingga pemerintah juga dengan mudah mengambil Tindakan dan solusi untuk hal ini. Selain media, peran pemerintah dalam menangani konflik ini sangat diperlukan. Pemerintah diharapkan mampu melihat akar masalah yang terjadi di tanah Papua yang tidak ada ujungnya ini. Pemerintah juga diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik entah dari pihak pemilik modal ataupun dari pihak masyarakat adat, agar tidak adanya kesalahpahaman atau hal apapun yang memperkeruh masalah. Hal inilah yang menjadi penyebab melemahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk lebih focus lagi dalam pengawasan ataupun pembuatan kebijakan terutama masalah urgensi seperti yang terjadi di tanah Papua hari ini.

D. Penutup

Sistem ekonomi kapitalisme merupakan salah satu sistem ekonomi yang dianggap anarkhi yang dikemukakan oleh Adam Smith dan rekan-rekannya, dimana mereka menjelaskan bahwa sistem kapitalis itu berarti pemilik modal memiliki hak penuh atas proses ekonomi yang dijalankannya. Dengan menerapkan sistem kapitalisme ini, para ekonom atau pemilik modal memiliki hak penuh atas kegiatan ekonomi, pemerintah tidak harus ambil bagian dalam mengatur kegiatan ekonomi dan memberikan kebebasan penuh kepada pemilik modal untuk menentukan segala sesuatunya tanpa campur tangan pemerintah itu sendiri. Pada hakikatnya sistem ekonomi kapitalis ini berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat sekitar ataupun pekerja yang bekerja disitu. Kenapa demikian? Karena dengan menerapkan sistem ekonomi kapitalis ini sangat berdampak pada timbulnya kesenjangan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan dan banyak hal lain yang terjadi dan merugikan masyarakat setempat. Seperti yang di katakana Karl Marx yang mengkritik teori kapitalis dari Adam Smith yang mengatakan bahwa dalam teori kapitalisme kaum pemilik modal melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh sehingga adanya pemabgian kelas diantara keduanya. Dan hal ini ditolak oleh Karl Marx karena ia merasa tidak perlu adanya kelas diantara kaum buruh dan kaum pemilik modal karena suatu saat semua itu bisa saja berbalik dimana yang menjadi pemilik modal akan menjadi buruh dan begitu sebaliknya.

Salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ini pada dasarnya dikarenakan perbedaan sumber daya yang dihasilkan setiap daerah. Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi perlulah adanya pembangunan ekonomi yang merata disetiap daerah, seperti pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan, serta modal-modal sosial untuk pembangunan berkelanjutan daerah tersebut. Namun, perbedaan hasil alam atau sumber daya alam bukanlah tolak ukur dan bahkan menjadi alasan adanya ketimpangan sosial dan ekonmi pada masyarakat, melainkan meningkatkan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan berkelanjutan. Saran peneliti untuk dalam penelitian ini untuk pemerintah yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat dan menjadi pelindung masyarakat diharapkan lebih memperhatikan keadaan masyarakat secara langsung, menyaksikan kehidupan sosialnya, pendidikannya, dan juga pekerjaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, panulis ucapkan terimakasih kepada Tuhan yang Maha Esa, atas penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam keadaan apapu. Tak lupa juga penulis ucapkan terikasih kepada bapak Angga Rosidin selaku dosen pengampu matakuliah Teori Sosial Indonesia yang dengan sabar membimbing penulis dalam penelitian ini. Dan terimakasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang dengan caranya masing-masing mendukung penulis dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Hasan Zainol, M. (2020). Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 24–34.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>
- Redi, A. (2016). *Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945 Contract of Work of PT Freeport Indonesia in Pancasila and UUD 1945 Perspective*.
- Rezki Amalia Fathurrahman. (n.d.). *Kritik Karl Marx Terhadap Kapitalisme dan Pengertian Sosialisme*.
- Robert Hendrik, & Endah Ratna Sonya. (2024). Analisis Konflik dan Masalah Sosial di Papua. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 4(1), 32–46.
<https://doi.org/10.33830/humaya.v4i1.5309>
- Safitri, N. (2011). Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan Pt Freeport Indonesia (Tinjauan Antropologis). *Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma*, 4.
- Soe'oed Verani Destari. (2024). Analisis Kebijakan Ekstraktivisme Sumber Daya Alam : Studi Kasus Freeport Dan Ketimpangan Ekonomi di Papua. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12.

Vol. 1 No. 1 Juni 2025 https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/nagara	Nagara: Jurnal Ilmu Administrasi, Pemerintahan dan Politik ISSN: XXXXX
---	--